

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap organisasi baik bisnis maupun publik menjadikan kinerja sebagai perhatian utama untuk mencapai kinerja yang baik. Kinerja bisa diketahui jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan berupa tujuan-tujuan atau target-target yang hendak ingin dicapai.

Kinerja Keuangan sektor bisnis menggambarkan keberhasilan perusahaan berupa hasil yang telah dicapai berkat berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Kinerja keuangan sebagai suatu analisis untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aktivitas sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan.

Kinerja Keuangan Instansi Pemerintahan menggambarkan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Kinerja pemerintahan tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Menurut Silaban dan Harefa (2017) **“pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam perusahaan.”**¹ Pengukuran kinerja dianggap sebagai salah satu faktor penting karena pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan perusahaan, pengukuran kinerja juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan sistem imbalan dalam perusahaan, misalnya untuk menentukan tingkat gaji karyawan maupun reward yang layak. Dan bagi organisasi sektor publik khususnya di Pemerintahan Daerah pengukuran

¹ Adanan Silaban dan Meilinda St 1 fa, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2017, hal.167

kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer publik dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif .

Kinerja Pemerintah Daerah seharusnya mendapat perhatian lebih, bukan hanya pemerintah pusat namun hal tersebut juga harus dilakukan oleh masyarakat setempat karena berkaitan dengan manifestasi yang akan diterima masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan. Kinerja pemerintah daerah harus bisa dipertanggungjawabkan, mengingat bahwa pemerintah daerah berhak, berkewajiban dan memiliki wewenang untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat (UU No. 23 Tahun 2014).

Sebagian besar pemerintah daerah berlomba-lomba untuk melakukan kinerja dengan baik. Departemen Dalam Negeri memberikan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat tinggi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan hukuman bagi yang tidak dapat menjalankan otonomi daerah (PP No. 6 Tahun 2008). Tujuan pemberian penghargaan dan hukuman tidak lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola APBD karena untuk sekarang ini peningkatan kinerja pemerintah daerah bukan lagi sebagai kewajiban namun sebagai suatu kebutuhan.

Upaya meningkatkan kinerja seharusnya diiringi dengan pengukuran kinerja yang baik. Menurut Ulum (2009) **“Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah.”**² Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Hal ini diperlukan untuk memastikan tercapainya pengeluaran yang tidak

² Ihyaul Ulum, **Audit Sektor Publik**, Edisi 1, Cetakan ke-1: Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal. 20

melebihi anggaran dan kegiatan yang direncanakan telah mencapai sasaran. Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh Instansi Pemerintahan.

Kondisi yang mendorong peningkatan kebutuhan adanya suatu pengukuran kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat karena pada era perkembangan ekonomis ini masyarakat menjadi semakin cerdas dan kritis menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga lembaga sektor publik. Tuntutan yang dilakukan masyarakat ini sesuai dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan good governance, yaitu pemerintahan yang bersih, ekonomis, efektif, transparan, responsif, dan akuntabel.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja dimana pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan secara baik. Sistem penganggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan sistem anggaran kinerja, seluruh pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan Pemerintah daerahnya secara baik.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah *Value For Money*. Menurut Mardiasmo (2009) **“Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.”**³

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan karena selama ini sektor publik dinilai sebagai sarang inefisiensi pemborosan, dan sumber kebocoran dana. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan kinerja yang mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Menurut Mardiasmo (2009) pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud sebagai berikut:

- 1. pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah.**
- 2. ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.**
- 3. ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.”**⁴

Dengan dilakukannya maksud dari pengukuran kinerja, maka kita juga bisa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja periode berikutnya. Selain itu, kita juga bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

³ Mardiasmo, **Akuntansi Sektor Publik**, Edisi ke-IV, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 127

⁴ **Ibid**, hal. 121

Laporan yang digunakan untuk pengukuran kinerja adalah Laporan Realisasi Anggaran. Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah.”**⁵ Jika dibandingkan dengan neraca, Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting, dan LRA ini merupakan jenis laporan keuangan daerah yang dahulu dihasilkan sebelum kemudian diisyaratkan untuk membuat laporan neraca dan arus kas.

Sebagai salah satu aparatur lembaga di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan untuk peningkatan pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan aparatur Pemerintah Kota Medan, meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Medan, meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.

Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Medan dibawah ini:

Tabel 1.1
Laporan Realisasi dan Anggaran Pendapatan Daerah per 31 Desember
Tahun 2013-2017

Tahun	Pendapatan		%
	Anggaran	Realisasi	

⁵ Amran Manurung dan Halomoan Sihombing, **Analisis Laporan Keuangan (Sektor Swasta dan Pemerintahan Daerah)**, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2018, hal. 216

Sumber:	2013	32.856.654.954,32	25.028.347.591,82	76,17
Badan Pengelola	2014	19.823.791.825,00	33.105.203.357,26	167,00
Keuangan dan	2015	78.312.868.999,53	53.166.014.123,74	67,89
Aset Daerah Kota	2016	56.707.889.419,45	62.798.039.757,58	110,74
Medan	2017	75.017.092.858,81	48.210.227.739,30	64,27

Berdasarkan

tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa pendapatan mengalami fluktuasi yaitu pendapatan pada tahun 2013 terealisasi 76,17% tidak mencapai target yang dianggarkan. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan meningkat yaitu sebesar 90,83% dengan realisasi 167,00% melebihi dari target yang dianggarkan. Realisasi pendapatan pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 99,11% dengan realisasi pendapatan sebesar 67,89%. Pada tahun 2016 realisasi pendapatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 42,85% dengan realisasi sebesar 110,74% dan mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 46,47% dengan realisasi sebesar 64,27%.

Tabel 1.2

Laporan Realisasi dan Anggaran Belanja Daerah per 31 Desember

Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja		%
	Anggaran	Realisasi	
2013	20.018.640.000,00	13.777.196.225,00	68,82
2014	20.844.435.000,00	15.695.282.130,00	73,30
2015	19.691.251.000,00	17.615.089.123,00	89,46
2016	21.430.087.000,00	18.254.314.067,00	85,18

2017	28.927.986.416,00	23.294.827.909,00	80,53
------	-------------------	-------------------	-------

Sumber:

Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Berdasarkan tabel 1.2 belanja mengalami fluktuasi yaitu belanja pada tahun 2013 terealisasi sebesar 68,82%. Realisasi belanja pada tahun 2014 meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,48% dengan realisasi sebesar 73,30%. Pada tahun 2015 realisasi belanja kembali mengalami peningkatan yaitu 16,16%, terealisasi sebesar 89,46%. Pada tahun 2016 dan 2017 realisasi belanja mengalami penurunan bila dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu 4,28% dan 4,65%, terealisasi sebesar 85,18% dan 80,53%. Realisasi belanja sejak tahun 2013-2017 mengalami selisih kurang maka sangat mungkin telah terjadi kelemahan dalam perencanaan anggaran sehingga estimasi belanjanya kurang tepat, atau tidak terserapnya anggaran tersebut bisa jadi disebabkan karena sudah diamanatkan dalam anggaran.

Laporan realisasi anggaran pendapatan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 menunjukkan kenaikan dan mengalami penurunan ditahun 2017, sedangkan realisasi belanja pada tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013, 2015, dan 2017 realisasi pendapatan berada dibawah total yang dianggarkan dan realisasi belanja pada tahun 2013 sampai tahun 2017 berada dibawah total yang dianggarkan. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya program dengan target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MEDAN."**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut: **“Bagaimana Kinerja Keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan**

1.3. Masalah

Agar penelitian ini dapat dibahas dengan tuntas serta terfokus, maka diperlukan pembatasan masalah. Penelitian ini hanya memfokuskan pada pengukuran kinerja dengan menggunakan metode *value for money* yang terdiri dari tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini akan meneliti objek penelitian dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2013-2017. Data yang akan diambil yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2. Bagi Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *Value For Money* pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang sama di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kinerja

2.1.1 Pengertian Kinerja

Kinerja pada instansi pemerintahan kini menarik perhatian dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian kinerja menurut dari beberapa literatur yaitu:

Menurut Bastian (2006) **“kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/progam/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”**⁶ Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang ingin dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Menurut Rai R. et. al (2010) **“Kinerja adalah cara perseorangan atau kelompok dari suatu organisasi menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas.”**⁷ Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Menurut Silaban dan Harefa (2017) **“kinerja adalah tampilan keadaan utuh atas perusahaan selama periode tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki.”**⁸ Hasil atau prestasi meng 11 an keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh kegiatan organisasi harus dapat dicatat dan diukur.

⁶ Indra Bastian, **Akuntansi Sektor Publik**, Erlangga, Yogyakarta, 2006, hal. 274

⁷ Gusti Agung Rai, **Audit Kinerja Pada Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hal. 41

⁸ Adanan Silaban dan Meilinda Stefani Harefa, **Op. Cit.**, hal. 168

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi atau organisasi dihubungkan dengan visi yang diemban oleh suatu organisasi.

2.1.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi tersebut harus dapat dicatat dan diukur. Pengukuran ini tidak hanya dilakukan pada input (masukan) program, tetapi juga pada keluaran-manfaat dari program tersebut.

Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian kinerja menurut dari beberapa literatur yaitu:

Menurut Ulum (2009) **“Pengukuran kinerja adalah cara untuk mempertahankan prestasi pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah.”**⁹ Pengukuran kinerja membantu pejabat pemerintah daerah dalam menentukan tingkatan pencapaian tujuan dan dilanjutkan dengan penilaian keluaran yang dilakukan dengan membandingkan perubahan ekonomi atau perubahan sosial dari pelaksanaan sebuah kegiatan/kebijakan terhadap tujuan kegiatan/kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut Sari R. et. al.. (2015) **“Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut**

⁹ Ihyaul Ulum, **Op. Cit.**, hal. 20

telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.”¹⁰ Akuntabilitas pimpinan publik akan dikatakan berhasil apabila output yang dihasilkan dapat dirasakan oleh masyarakat dengan tindakan nyata yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Bastian (2006) **“pengukuran kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.”¹¹** Dengan diterapkannya pengukuran kinerja maka kita bisa memastikan apakah pengambilan keputusan dilakukan secara tepat dan objektif.

Dari beberapa defenisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat atau menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

2.1.3 Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi, program, atau kegiatan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk menilai tingkat besarnya penyimpangan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan. Hal yang mendasari pentingnya pengukuran kinerja sektor publik terkait dengan tanggung jawabnya dalam memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan sistem pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom up).**
- 2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.**

¹⁰ Eka Nurmala Sari R. et. al.. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**, Cetakan Pertama: Perdana Publishing, Medan, hal. 17

¹¹ Indra Bastian, **Op. Cit.**, Hal 292

3. **Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta untuk mencapai goal congruence.**
4. **Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.**¹²

2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Sektor publik tidak bisa lepas dari kepentingan umum sehingga pengukuran kinerja mutlak diperlukan untuk mengetahui seberapa berhasil misi sektor publik tersebut dapat dicapai penyedia jasa dan barang-barang publik. Sementara dari perspektif internal organisasi, pengukuran kinerja juga sangat bermanfaat untuk membantu kegiatan manajerial keorganisasian.

Menurut Harun (2009) manfaat sistem pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. **Sebagai fasilitas pembelajaran perbaikan layanann.**
2. **Sebagai pembelajaran memperbaiki praktik manajemen.**
3. **Sebagai alat pelaporan akuntabilitas dan transparansi.**
4. **Sebagai alat ungkap sesuai dengan hukum yang berlaku.**¹³

Berdasarkan manfaat pengukuran kinerja diatas, pengukuran kinerja sektor publik dapat dinyatakan dalam dua fungsi utama yang saling terkait yaitu sumber pembelajaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan serta pendorong akuntabilitas dan transparansi sebagai bagian dari tuntutan hukum.

2.1.5 Faktor Penentu Keberhasilan Pengukuran Kinerja

Sektor publik merupakan sektor yang mengalami tekanan untuk terus dapat meningkatkan kegiatannya dan memberikan produk layanan secara lebih efisien dan dapat mengurangi biaya yang timbul bagi pembayaran pajak. Dalam hal ini, pengukuran kinerja merupakan alat yang

¹² Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 122

¹³ Harun, **Reformasi Akuntansi Dan Manajemen Sektor Publik Di Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal. 73

bermanfaat dalam usaha mencapai tujuan tersebut, karena itu harus memperhatikan hal-hal penting dalam melakukan pengukuran kinerja.

Menurut Bastian (2006) Agar pengukuran kinerja dapat dilaksanakan dengan baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Membuat suatu komitmen untuk mengukur kinerja dan memulainya dengan segera.**
2. **Perlakuan pengukuran kinerja sebagai suatu proses yang berkelanjutan (*on-going process*).**
3. **Sesuaikan proses pengukuran kinerja dengan organisasi.**¹⁴

2.1.6 Kendala Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian tujuan melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa atau suatu proses. Pada kebanyakan organisasi sektor swasta, ukuran kinerja ini adalah berupa tingkat laba. Namun organisasi sektor publik tidak hanya bisa menggunakan ukuran laba ini untuk menilai keberhasilan organisasi karena memang tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, output organisasi sektor publik pada umumnya juga bersifat intangible dan indirect yang menjadi kendala tersendiri dalam melakukan pengukuran kinerja.

Menurut Bastian (2006) kendala pengukuran kinerja sektor publik antara lain:

1. **Tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba**
2. **Sifat output adalah *kualitatif, intangible dan indirect*.**
3. **Antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung (*discretionary cost center*)**
4. **sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar.**
5. **Berhubungan dengan kepuasan pelanggan (masyarakat).**¹⁵

2.2. Value For Money

¹⁴ Indra Bastian, **Op. Cit.**, hal. 277

¹⁵ **Ibid**, Hal 291

2.2.1 Pengertian *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009) “***Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah.**”¹⁶ *Value for money* menghendaki organisasi sektor publik dalam memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektifitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu menggunakan uang publik (anggaran) secara hemat, cermat, dan tepat untuk target sasaran dan tujuan.

Dimana pengertian masing-masing tersebut adalah:

1. **Ekonomis**

Menurut Sari R. et. al (2015) “**Ekonomis, merupakan perolehan masukan (input) dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah.**”¹⁷ Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Menurut Mardiasmo (2009) “**Ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan (cost of input).**”¹⁸ Dengan kata lain, ekonomis adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang dimungkinkan (*spending less*).

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011) “**Ekonomis berarti sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar.**”¹⁹ Konsep ini menekankan terkait sejauh mana organisasi sektor

¹⁶ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 127

¹⁷ Eka Nurmala Sari R. et al, **Op Cit.**, hal. 18

¹⁸ Mardiamo, **Op. Cit.**, hal. 131

¹⁹ Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Akuntansi Sektor Publik**, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hal. 160

publik dapat meminimalisasi penggunaan sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Ekonomis memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh secara hemat yaitu dengan harga yang lebih rendah (*spelling less*) atau lebih murah dengan kualitas tertentu.

Indikator ekonomis merupakan indikator tentang input. Pertanyaannya yang diajukan adalah “apakah organisasi telah mengeluarkan biaya secara ekonomis?”

2. Efisiensi

Menurut Ulum (2009) **“Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas.”**²⁰ Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan (*cost output*). Proses kegiatan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan dan sumber daya oleh suatu unit organisasi (misalnya: staf, upah, biaya administratif) dan keluaran yang dihasilkan.

Menurut Bastian (2006) **“Efisiensi adalah hubungan input dan output dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai output tertentu”**²¹ Suatu program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (*spending well*).

²⁰ Ihyaul Ulum, **Op. Cit.**, hal. 26

²¹ Indra Bastian, **Op. Cit.**, hal. 4

3. Efektivitas

Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan/kebijakan dimana ukuran efektivitas merupakan refleksi output. Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai.

Berikut ini akan disajikan beberapa pengertian efektivitas menurut dari beberapa literatur yaitu:

Menurut Ulum (2009) **“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan pencapaian tujuan atau sasaran yang harus dicapai.”**²² Kegiatan operasional akan dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Ukuran efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program.

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2011) **“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.”**²³ Apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut berjalan dengan efektif. dengan kata lain efektivitas menggambarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

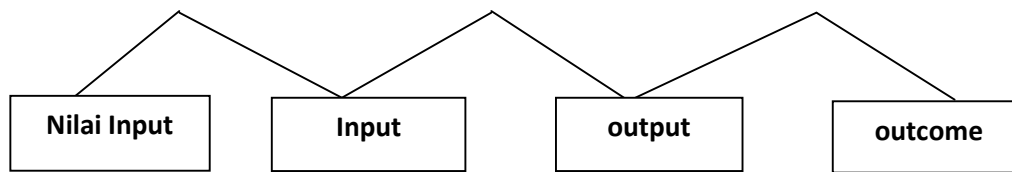
Menurut Bastian (2006) **“Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”**²⁴ Efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Secara skematis, *Value For Money* dapat digambarkan sebagai berikut:



²³ Deddy Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, **Op. Cit.**, hal. 161

²⁴ Indra Bastian **Op. Cit.**, hal. 280



Sumber: Mardiasmo (2009)

Gambar 2.1 Konsep *Value For Money*

Value for money tidak semata mengukur biaya barang dan jasa melainkan juga memasukkan gabungan dari unsur kualitas biaya, sumber daya yang digunakan, ketetapan penggunaan, batasan waktu dan kemudahan dalam menilai apakah secara bersamaan kesemua unsur tersebut membentuk “*value*” (nilai) yang baik.

Implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukan seiring dengan meningkatkannya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik (*public cots awareness*).

2.2.2 Indikator *Value For Money*

Tuntutan baru transparansi dan akuntabilitas dalam organisasi sektor publik harus memeperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik. *Value for money* menghendaki organisasi sektor publik dapat memenuhi prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tersebut secara bersama-sama yang berarti mampu menggunakan uang publik (anggaran) secara hemat, cermat, dan tepat untuk target serta sasaran dan tujuan.

Menurut Mardiasmo (2009) **“Peranan indikator kinerja pada *Value For Money* adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan.”**²⁵

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif.

Mardiasmo (2009) juga membagi indikator *value for money* menjadi dua, yaitu:

- 1. Indikator Alokasi Biaya (ekonomis dan efisiensi)**
- 2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas).**²⁶

2.2.3 Tujuan dan Manfaat *Value For Money*

Menurut Mardiasmo (2009) **“Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis: (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (Berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.”**²⁷

Dari Tujuan yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan *Value For Money* dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik sangat membantu suatu instansi pemerintahan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tepat dan sesuai sasaran sehingga terciptanya mutu pelayanan yang baik dengan penggunaan sumber daya yang ekonomis, efektif dan efisien.

²⁵ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal 130

²⁶ **Loc. Cit**

²⁷ **Loc. Cit**

2.2.4 Langkah-Langkah Pengukuran Value For Money

Dalam melakukan pengukuran kinerja dengan metode *value for money*, langkah-langkah pengukuran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Ekonomis

Pengukuran ekonomis hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. Ekonomis merupakan ukuran relatif. Pertanyaan sehubungan dengan pengukuran ekonomis adalah sebagai berikut.

- a. Apakah biaya organisasi lebih besar dari yang telah dianggarkan oleh organisasi?
- b. Apakah biaya organisasi lebih besar dari pada biaya organisasi lain yang sejenis yang dapat diperbandingkan?
- c. Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya finansialnya secara optimal?

Menurut Mahsun (2006) **“Mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasinya.”**²⁸

Menurut Mahsun (2016) Tingkat Ekonomi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Anggaran Pengeluaran}} \times 100\% \text{ } ^{29}$$

Menurut Mahsun (2016) Kriteria ekonomis adalah:

- a. **Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti ekonomis.**
- b. **Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti ekonomis berimbang**
- c. **Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak ekonomis**³⁰

²⁸ Mahsun, **Pengukuran Kinerja Sektor Publik**, Edisi Pertama, Cetakan Keenam: BPFE, Yogyakarta, 2016, hal. 186

²⁹ **Loc. Cit**

2. Pengukuran Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2009) **“Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input.”**³¹ Mengukur tingkat input dari organisasi sektor publik terhadap tingkat outputnya sektor publik. Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi pendapatan.

Menurut Mahsun (2016) tingkat efisiensi diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\% \text{ } ^{32}$$

Menurut Mahsun (2016) Kriteria Efisiensi adalah:

- a. **Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) berarti efisien.**
- b. **Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) berarti efisiensi berimbang.**
- c. **Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) berarti tidak efisien**³³.

3. Pengukuran Efektivitas

Menurut Sari R.et.al (2015) **“Efektivitas adalah perbandingan antara hasil yang diharapkan (target) dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.”**³⁴ Efektivitas menggambarkan perbandingan antara output dan outcome. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

³⁰ **Loc. Cit**

³¹ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 133

³² Mahsun, **Op. Cit.**, hal. 187

³³ **Loc. Cit**

³⁴ Eka Nurmala Sari R. et al., **Op. Cit.**, hal. 19

Menurut Mahsun (2016) Tingkat Efektivitas dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%^{35}$$

Mahsun (2016) Kriteria efektivitas adalah

- a. **Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x<100%) berarti tidak efektif.**
- b. **Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efektivitas berimbang**
- c. **Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x>100%) berarti efektif³⁶**

2.2.5 Value For Money Sebagai Metode Penilaian Kinerja

Menurut Mardiasmo (2009) **“Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial.”³⁷** Sistem pengukuran kinerja dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*.

Menurut Mardiasmo (2009) Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud yaitu:

1. **Membantu memperbaiki kinerja pemerintah.**
2. **Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.**
3. **Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.”³⁸**

³⁵ Mahsun, **Op Cit.**, hal. 187

³⁶ **Loc Cit**

³⁷ Mardiasmo, **Op. Cit.**, hal. 121

³⁸ **Loc. Cit**

Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah: ekonomi, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas publik. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.4.1 Pengertian APBD

Anggaran pendapatan merupakan batasan minimal jumlah pendapatan yang ditargetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. Anggaran belanja yaitu anggaran yang digunakan untuk membiayai keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU NO. 17 Tahun 2003 Pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD. Setiap penganggaran penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus memiliki dasar hukum

penganggaran. Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁹

2.4.2 Unsur - Unsur APBD

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan semakin normatif. Untuk itu dalam bentuk yang baru APBD terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.

Pendapatan asli daerah yang dimaksud dikelompokkan atas:

a. pendapatan asli daerah

Kelompok pendapatan asli daerah menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

³⁹ Nuramalia Hasanah, dan Achmad Fauzi, **Akuntansi Pemerintahan**, In Media, Bogor, 2017, hal 34

1. Hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat.
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban kerusakan akibat bencana alam.
3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
4. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah.
5. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2. Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2009) **“Dalam kaitannya dengan belanja daerah, terdapat dua aspek yang secara konseptual berbeda tetapi memiliki keterkaitan yang erat, yaitu kebijakan belanja (*expenditure policy*) dan manajemen belanja (*expenditure management*).”**⁴⁰

Kebijakan belanja terkait dengan penentuan “apa yang akan dilakukan” yang berimplikasi pada kebutuhan pengeluaran atau belanja, sedangkan manajemen belanja terkait dengan “bagaimana melaksanakan anggaran untuk membiayai aktivitas secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Menurut Manurung dan Sihombing (2018) **“Belanja dapat dipahami sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi kekayaan bersih yang terjadi akibat transaksi masa**

⁴⁰ Mahmudi, **Manajemen Keuangan Daerah**, Erlangga, Jakarta, 2016, Hal 78

lalu.”⁴¹ PSAP No. 2 paragraf 34 menyatakan bahwa belanja diklasifikasikan menurut ekonomi (jenis belanja, organisasi dan fungsi).

Klasifikasi belanja untuk tujuan pelaporan keuangan menurut PSAP Nol 2 paragraf 36-40 dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

2. Belanja modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

2.5. Kerangka Berfikir

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi. Pengukuran kinerja pada organisasi organisasi sektor publik tidak hanya berdasarkan pada ukuran finansial saja tetapi juga pada ukuran non-finansial karena tujuan utama organisasi ini bukan memperoleh laba melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja organisasi sektor publik yang bersifat multidimensional menyebabkan tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja. Selain itu, output yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik umumnya

⁴¹ Amran Manurung, dan Halomoan Sihombing, **Op. Cit**, Hal 237

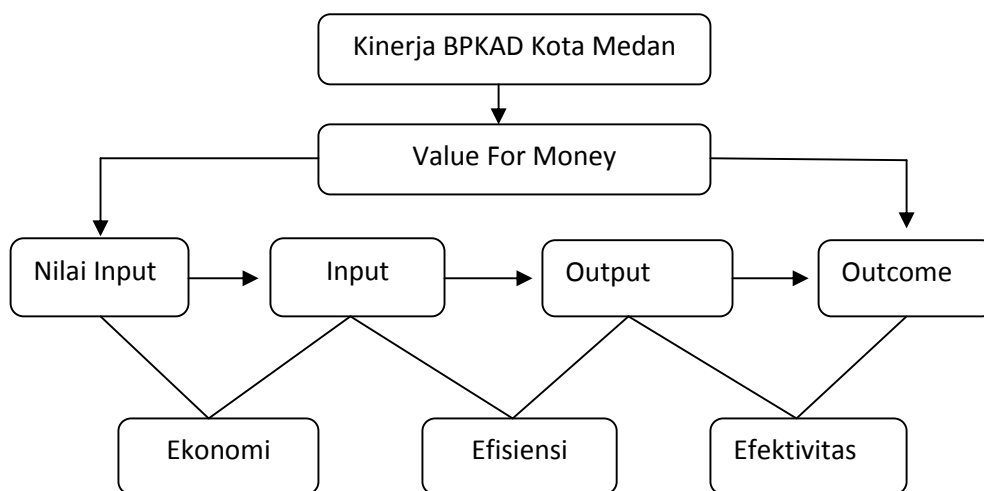
bersifat intangible, sehingga perlu adanya ukuran non-finansial yang dapat mencerminkan besarnya output yang dihasilkan.

Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik. *Value for Money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penjelasan dari masing-masing elemen sebagai berikut:

1. Ekonomi adalah pemerolehan sumber daya (input) tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisien merupakan perbandingan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
3. Efektivitas adalah tingkat keberhasilan suatu program dengan target yang telah ditetapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan sebagai salah satu organisasi sektor publik juga memerlukan pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja secara keseluruhan dalam melaksanakan program kerjanya. Pengukuran kinerja dengan metode *Value for Money* terdiri dari tiga elemen utama yaitu *input*, *output*, dan *outcome* dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kinerja, sehingga dapat diketahui tingkat kinerja ditinjau dari sisi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas yang telah dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Gambar 2.4 kerangka berfikir



Sumber: Mardiasmo, 2009

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Menurut Arikunto (2017) Ada tiga jenis penelitian yaitu:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian

2. Penelitian korelasi atau korelasional atau penelitian hubungan

Penelitian korelasi atau penelitian korelasional adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada

3. Penelitian Komparasi

Penelitian komparasi adalah penelitian yang bertujuan mengadakan perbandingan kondisi yang ada di dua tempat, apakah kedua kondisi tersebut sama, atau ada perbedaan, dan kalau ada perbedaan, kondisi ditempat mana yang lebih baik.⁴²

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bersifat menjelaskan kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dilakukan berdasarkan metode *Value For Money*.

3.2. Objek Penelitian

⁴² Suharsimi Arikunto, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, Edisi Revisi, Cetakan ke-14: Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal.3-6

Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Petisah Tengah Kota Medan. Peneliti melakukan penelitian pada BPKAD Kota Medan karena peneliti melihat bahwa masih rendahnya realisasi anggaran pendapatan dan belanja dengan target/ anggaran yang tinggi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3.3. Defenisi Operasional Variabel ³³

Variabel dalam penelitian ini adalah *Value For Money*. *Value For Money* merupakan konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomi, efisiensi, dan ekonomis

1. Ekonomis

Ekonomis adalah kehematan yang mencakup pengelolaan secara hati-hati atau cermat (prodency) dan tidak ada pemborosan. Suatu kegiatan dikatakan ekonomis apabila dapat menghilangkan atau mengurangi biaya yang tidak perlu. ⁴³

Tingkat ekonomi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

2. Efisiensi

Menurut Ulum (2009) “Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost output*).”

⁴³Ihyaul Ulum, *Op Cit*, Hal 25

Efisiensi dapat menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.

Tingkat efisiensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya Untuk Memperoleh Pendapatan}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

3. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antaran output dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan operasional dapat dikatakan efektif (berhasil guna) apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun anggaran 2013-2017 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diambil secara

tertulis terutama berupa dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan pada tahun 2013-2017.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) **“metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya sudah jelas, dan umumnya dilakukan pada populasi yang luas sehingga hasil penelitian kurang mendalam.”**⁴⁴ Teknik analisis kualitatif yang digunakan yaitu menjelaskan hasil dari perhitungan kinerja dengan menggunakan *Value For Money* dengan menggunakan indikator ekonomis, efisiensi, efektivitas dan *outcome*. yang menyajikan data dan menghitung kinerja dengan menggunakan metode *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Sementara itu menurut Sugiyono (2017) **“metode penelitian kualitatif cocok digunakan untuk meneliti dimana masalahnya belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna.”**⁴⁵ Teknis Analisis kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka perhitungan dengan menggunakan teori yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas dengan menghitung dan menyajikan kinerja keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dengan menggunakan metode *Value for money*.

a. Ekonomis

⁴⁴ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan ke-15: Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 37

⁴⁵ **Loc. Cit**

$$\mathbf{Ekonomis} = \frac{\mathbf{Realisasi\ Pengeluaran}}{\mathbf{Anggaran\ Pengeluaran}} \times \mathbf{100\%}$$

b. Efisiensi

$$\mathbf{Efisiensi} = \frac{\mathbf{Realisasi\ Biaya\ untuk\ Memperoleh\ Pendapatan}}{\mathbf{Realisasi\ Pendapatan}} \times \mathbf{100\%}$$

c. Efektivitas

$$\mathbf{Efektivitas} = \frac{\mathbf{Realisasi\ Pendapatan}}{\mathbf{Anggaran\ Pendapatan}} \times \mathbf{100\%}$$